

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL
BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *GOBIZ***
(Studi Kasus Rumah Makan Pecel Lele Mbak Mar 3 Jln Z.A Pagar Alam
Kedaton Labuhan Ratu Bandar Lampung)

Skripsi

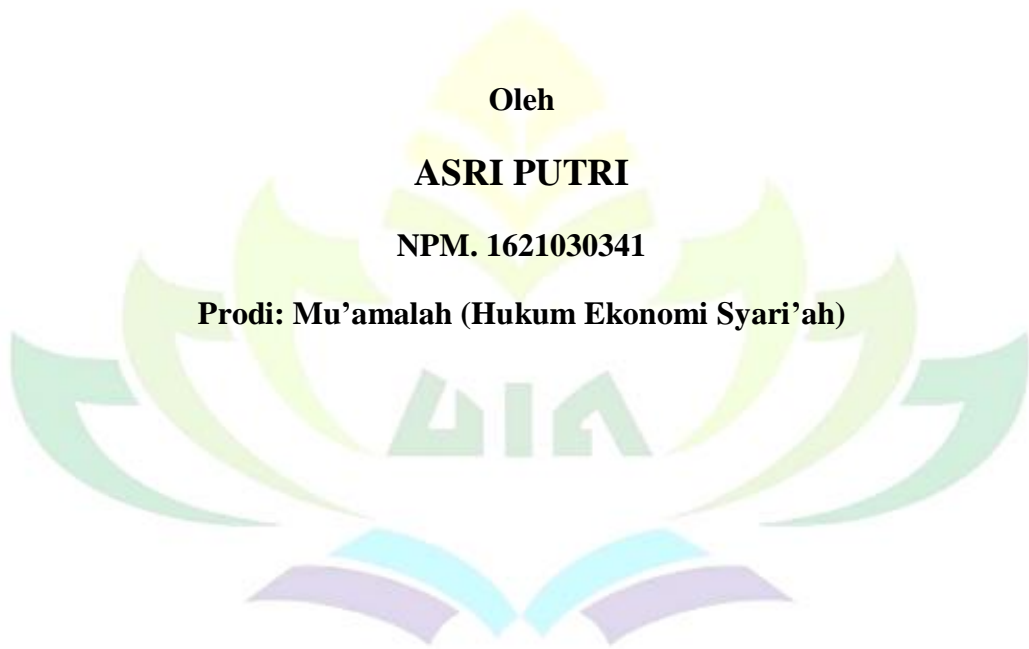
**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

ASRI PUTRI

NPM. 1621030341

Prodi: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL
BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *GOBIZ***
(Studi Kasus Rumah Makan Pecel Lele Mbak Mar 3 Jln Z.A Pagar Alam
Kedaton Labuhan Ratu Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

ASRI PUTRI

NPM. 1621030341

Prodi: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan sesuatu yang dapat menyiratkan isi atau maksud tujuan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu perlu penjelasan judul, secara jelas judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Makanan dan Minuman dengan Sistem Pembayaran *GoBiz* (Studi Kasus pada Rumah Makan Pecel Lele Mbak Mar 3 Jln. Z.A. Pagar Alam Kedaton Labuhan Ratu Bandar Lampung). Dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan maka perlu adanya penegasan judul, judul ini memiliki istilah-istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari kata tinjau yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia yang *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.² Menurut Beni Ahmad Saebani, hukum Islam adalah seperangkat landasan hukum suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah *swt* dan Rasulullah *saw*.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 951).

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 5.

³ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 11.

3. Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa yang berakibat hukum pada berpindahnya hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang berimplikasi pada kerelaan (*taradhin*) sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'* (hukum Islam).⁴
4. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.⁵
5. *GoBiz* adalah sebuah aplikasi *mobile* khusus untuk para partner *Go-Food* untuk membantu mengelola rumah makan pada layanan *Go-Food* dengan lebih mudah, cepat dan praktis.⁶

Berdasarkan penegasan judul dengan beberapa istilah di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini bertujuan untuk meninjau tentang suatu hukum Islam tentang jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran aplikasi *GoBiz*.

B. Alasan Memilih Judul.

Ada beberapa hal yang mendasari sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif adalah masalah yang terjadi di lapangan ialah pembayaran dengan sistem aplikasi *GoBiz*. *GoBiz* ialah pembayaran non tunai dan bentuk kerja sama antara pihak Gojek dan pemilik rumah makan yang tujuan awalnya adalah untuk memudahkan pembayaran. Namun terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Di mana kesepakatannya ialah bahwa

⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. 140.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 521.

⁶ <https://medium.com/@merchant.marketing/cepat-dan-mudah-aturl-menu-dengan-goresto-a840a97dbce>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2019, pukul 20:19 WIB.

uang akan masuk ke dalam rekening *merchant* (pihak rumah makan) dalam waktu H+1, akan tetapi sering terjadi keterlambatan lebih dari satu minggu. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami pihak *merchant*, di mana pihak *merchant* seharusnya telah mendapat keuntungan yang diperoleh dari penjual tersebut.

2. Alasan Subjektif adalah bahwa judul ini sangat relevan sesuai dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

C. Latar Belakang Masalah

Secara umum ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu *adabiyah* dan *madiyah*. Contoh dari muamalah *adabiyah* adalah ijab dan kabul, saling suka, tidak ada keterpaksaan dan lain sebagainya. Sedangkan contoh muamalah *madiyah* adalah masalah jual beli (*al-bai'/'al-tijarah*), gadai (*al-rah*n), pemberian (*hibah*) dan lain sebagainya.⁷

Tujuan dasar muamalah adalah untuk mengatur ketertiban dalam bermuamalah. Dan dalam mengatur persoalan muamalah, Alquran dan hadis lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya diserahkan kepada ahlinya. Akibatnya dalam prakteknya terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan.⁸ Muamalah hanya mengatur prinsip dasarnya saja dan tidak mengatur secara teknis. Apabila muamalah mengatur yang sifatnya teknis

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 4.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 42.

saja, maka akan hilang dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan hal ibadah dan akidah, maka setiap teknisnya bersifat final dan telah diatur di dalam Alquran dan hadis.

Salah satu praktek muamalah yang mengalami kemajuan yang disebabkan karena adanya perkembangan zaman adalah transaksi jual beli dengan sistem pembayaran aplikasi *GoBiz*.

Pada era global saat ini, kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam melakukan transaksi jual beli. Sebelumnya praktek jual beli adalah praktek transaksi secara tatap muka (*face to face*) antara kedua belah pihak, begitupun dengan cara pembayarannya dengan sistem tunai. Sesuai dengan perkembangan zaman, transaksi dan pembayaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa Gojek melalui aplikasi *GoBiz* dalam pemesanan kuliner seperti pecel lele.

Aplikasi Gojek merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan masyarakat saat ini. Sesuai dengan slogannya yaitu *an ojek for every need*. Aplikasi tersebut menyediakan beberapa kebutuhan hidup dan menyediakan beberapa pelayanan yang memudahkan konsumen. Dan tidak hanya mempermudah para konsumen, Gojek pula memberikan kemudahan untuk bertransaksi bagi seluruh mitranya, salah satunya ialah aplikasi *GoBiz*. *GoBiz* merupakan pembayaran non tunai yang disediakan untuk *merchantnya* yaitu rumah makan. Dengan ketentuan sejumlah biaya yang digunakan untuk menalangi konsumen akan dikembalikan via transfer dengan ketentuan H+1 setelah transaksi terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis sangat tertarik dan layak untuk diteliti serta dikaji lebih dalam dengan mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Makanan dan Minuman dengan Pembayaran dengan Sistem Aplikasi *GoBiz*.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fungsi fokus penelitian adalah untuk memberikan batasan dan cakupan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan akibat perbedaan pemahaman antara pembaca dan penulis, dan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini. Menurut Spradley bahwa fokus penelitian adalah *A focused refer to a singel cultural domain or few domains* maksudnya adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.⁹

Dalam penelitian kualitatif lebih diarahkan pada tingkatan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk mempertajam penelitian, maka fokus penelitian ini dibatasi pada bagaimana praktek transaksi jual beli makanan dan minuman pada rumah makan pecel lele Mbak Mar 3 dengan aplikasi *GoBiz* dan bagaimana status hukumnya menurut Islam.

Hal ini bertujuan agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 377.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang fokus penelitian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran melalui aplikasi *GoBiz* di rumah makan pecel lele Mbak Mar 3?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran melalui aplikasi *GoBiz* di rumah makan pecel lele Mbak Mar 3?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran melalui aplikasi *GoBiz* di rumah makan pecel lele Mbak Mar 3.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran melalui aplikasi *GoBiz* di rumah makan tersebut.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis untuk mendapatkan jawaban hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran melalui aplikasi

GoBiz di rumah makan pecel lele Mbak Mar 3 Jln Z.A Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) serta sebagai bacaan dan telaah yang berguna bagi masyarakat umumnya.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku objek yang diteliti dan diamati. Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka sebagai tambahan dalam penyusunan karya ilmiah.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁰ Maka di dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktek jual beli makanan dan minuman dengan pembayaran melalui sistem aplikasi *GoBiz* yang dilakukan oleh seluruh responden.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan objek yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Di dalam penelitian ini yang diambil penulis yaitu adalah pihak rumah makan pecel lele Mbak Mar 3 Jln. Z.A Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung, konsumen dan *driver* Gojek.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa yang jaraknya tidak jauh dari sumber orisinil, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu buku-buku kepustakaan, catatan-catatan atau dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan pembahasan ini.¹¹

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 75.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 12.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹² Artinya penulis memperoleh informasi langsung dari seluruh responden dalam hal ini adalah pihak rumah makan pecel lele Mbak Mar 3 Jln. Z.A Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung, konsumen dan *driver* Gojek.
- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri tentang objek penelitian tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan pembayaran melalui sistem aplikasi *GoBiz*.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang dihasilkan dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka penulis akan menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengeditan (*editing*) adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan.
- b. Sistematis data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹³

¹² Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 71.

¹³ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

5. Teknik Analisis Data

Terdapat dua metode cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Deduktif

Metode deduktif yaitu menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum.¹⁴ Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Al-Qur'an, hadis dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

b. Induktif

Metode induktif yaitu menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.

Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif.

¹⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.51.

Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵



¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, h.28.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tentang Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli secara etimologi dapat diartikan dengan:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ أَوْ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ.¹

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu yang lain.

Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ.

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.²

Para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli secara terminologi dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tersebut mencapai inti dan tujuan yang sama, pengertian jual beli menurut para ulama adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا.³

Artinya: Tukar menukar harta dengan harta yang berakibat hukum pada pemindahan milik dan kepemilikan”.

Taqiyuddin al-Hishni berpendapat:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.⁴

¹Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyasaar*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 448.

²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.

³Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 5.

Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلٍ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَادُونِ فِيهِ.⁵

Artinya: Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada kerelaan atau perpindahan hak milik dengan ganti/imbalan yang dilakukan dengan cara yang diizinkan/dibenarkan syara'.

Abdul Hamid Hakim menjelaskan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya: Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka".⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.⁸

Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia

⁴Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu'min al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2008), h. 333.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 2000), h. 89.

⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 64.

⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad.

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.⁹

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam al-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan jelas tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam.¹⁰

Dalil yang membolehkan transaksi jual beli yaitu firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹¹

Pada ayat yang lain Allah S.W.T menjelaskan dalam dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

Dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W dijelaskan:

⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*..., h. 64.

¹⁰Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 364.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., h. 84.

¹²*Ibid*, h. 150.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).¹³

Artinya: Diriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi' Rasulullah S.A.W pernah ditanya seseorang tentang usaha apakah yang paling baik? Maka Rasulullah S.A.W menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik.¹⁴

Berdasarkan *nash* baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist di atas, kaum muslimin telah berijma' tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada ditangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatupun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹⁵

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.¹⁶

¹³ Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Dar al-'Ilmi: Surabaya, tt), h. 798.

¹⁴ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, diterjemahkan oleh Syarif Abdullah (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), h. 195.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*..., h. 65.

¹⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104.

Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul (*shigat*) yang menunjukkan atas perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli baik dari perkataan ataupun perbuatan. Dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa rukun jualbeli ada dua yaitu ijab qabul dan serah terima.¹⁷

Menurut mayoritas ulama' rukun jual beli secara garis besar ada tiga,¹⁸ yaitu:

a. Penjual dan pembeli (*al-'Aqidani*), yaitu pemilik harta yang mentransaksikan barang dan uangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual dan membeli harta orang lain. Dalam ketentuannya kedua belah pihak ini harus memenuhi beberapa syarat yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karenanya apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.¹⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh.²⁰

¹⁷Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 124.

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PustakaSetia, 2001), h. 76.

¹⁹A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 105.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 141.

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.²¹ Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.²²

- 3) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.²³ Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai sumber

²¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 106.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 150.

²³ *Ibid.*,

kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan pada mereka dengan kata-kata yang baik.²⁴

- 4) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (fikih), dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum datang bulan/ *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Dalam hal ini kita ketahui bahwa apabila anak yang belum *baligh* (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemiliknya.²⁵ Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 berbunyi sebagai berikut:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 141.

²⁵ *Ibid.*,

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu.²⁶

- b. Ijab qabul (*Shighat*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. Sama seperti yang di atas, bahwa ijab qabul ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi yang dimaksud dengan syarat-syarat dalam akad ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul (*shigat*), yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- 1) Kecakapan hukum (*ahliyah*), yang dimaksud dengan syarat ini adalah kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syari'ah.²⁷ Maka dalam hal ini tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang idiot dan orang gila, hal ini dikarenakan ketidakadaan kecakapan hukum.
- 2) Hendaknya tidak ada pemisahan antara ijab dari penjual dan qabul dari pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam atau tidak

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 347.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 109.

menjawab setelah penjual menyatakan ijabnya. Dan tidak diperbolehkan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.²⁸

3) Hendaklah lafaz qabul sesuai dengan lafaz ijab.²⁹ Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 100.000,-“ lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 100.000,-. Apabila antara ijab ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual belinya tidak sah.

4) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, Kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.³⁰

5) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap, dan pasti sehingga tidak menimbulkan pemahaman lain.³¹

6) Ijab dan qabul tidak boleh dikaitkan dengan waktu (*mu'qqat*).³²

c. Barang jualan (*al-Ma'qud 'Alaih*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.³³ Objek jual beli

²⁸Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu'min al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar...*, h. 333.

²⁹Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, h. 362.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

³¹A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 110.

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 83.

(*al-Ma'qud 'Alaih*) yaitu barang atau benda yang menjadi sebab atau tujuan terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan, seperti: anjing dan minuman keras.³⁴ Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).³⁵

Artinya: Dari Jabir Bin Abdillah R.A. bahwasanya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun fath al-Makkah (penaklukan kota Makkah): Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.(H.R. Bukhari).³⁶

Tetapi terkadang tidak semua barang atau benda yang mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi hanya sebatas penggunaan manfaatnya dan bukan untuk dimakan, diminum atau dikonsumsi sebagai konsumsi manusiawi.³⁷

³³ A. Khumedi Ja'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia...*, h. 104.

³⁴ Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Minhaj al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 114.

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, No. 2236 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 84.

³⁶ Imam al-Munziri, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 513.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 92

2) Barang atau objek yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan,³⁸ maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan secara subjektif, karena terkadang suatu barang itu sangat bermanfaat untuk sebagian orang namun tidak semua orang. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari suatu transaksi ialah manfaatnya itu sendiri. Bila barang itu tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak, maka objek tersebut tidak dapat diperjualbelikan.³⁹

3) Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik asli atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah S.A.W dalam suatu riwayat hadis yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).⁴⁰

Artinya: Dari Hakim Bin Hizam ia berkata kepada Rasulullah S.A.W: Wahai Rasulullah ada seseorang laki-laki yang memintaku untuk menjual sesuatu yang bukan milikku, apakah aku boleh menjualnya? Maka Rasulullah S.A.W bersabda: Janganlah kalian menjual barang yang bukan hak milik kalian” (H.R. Ibn Majah).⁴¹

³⁸Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Minhaj al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh...*, h. 115.

³⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 197.

⁴⁰Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009), h. 816.

⁴¹Imam al-Munziri, *Ringkasan Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 499.

- 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, yang dimaksud di sini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan oleh penjual dan dapat diterima oleh pembeli. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah transaksi jual beli binatang liar, ikan yang berada di lautan dan burung di angkasa, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.⁴²
- 5) Barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas (*mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak.⁴³ Artinya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan, ketidakjelasan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

3. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak

⁴²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 27.

⁴³Oni Syaroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 38.

(*fasid*) atau batal (*bathil*). Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama' Hanafiyyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batak dan rusak. Perbedaan pendapat jumhur ulama' dan ulama' Hanafiyyah berdasarkan pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam masalah muamalah dan atau ibadah. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak sesuai atau kekurangan dengan ketentuan syariat.

Sedangkan Abdul Aziz Muhammad Azam menjelaskan dalam bukunya Fiqh Muamalat, bahwa hukum jual beli itu ada lima. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. Imam Al-Ghazali menambahkan hukum jual beli dengan menjelaskan, bahwa jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak, walaupun si pembeli adalah orang non muslim dan selain yang di atas hukumnya boleh.

4. Macam dan Bentuk Jual Beli

Mayoritas fukaha membagi jual beli menjadi dua bagian.⁴⁴ Dan pembagiannya adalah sebagai berikut:

⁴⁴Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, h. 234.

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.⁴⁵ Jual beli yang *shahih* menimbulkan implikasi atau akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan.⁴⁶
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap objek akad.⁴⁷ Masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yaitu:
 - 1) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila, atau jual beli yang objeknya *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara *syar'ii*, seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini mempunyai implikasi hukum berupa berupa tidak berpindahan milik karena ia dianggap tidak ada.⁴⁸
 - 2) Jual Beli *Fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang-orang yang cakap hukum (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli

⁴⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 121.

⁴⁶Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, h. 234.

⁴⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 71.

⁴⁸*Ibid.*

itu menjadi rusak.⁴⁹ Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk antara lain:

- a) Jual beli *majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).⁵⁰
- b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang.
- c) Jual beli yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad.
- d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*).
- e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamr
- f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.⁵¹ Menurut Syafi'iyah jual beli ini bathil dan menurut Hanafiyah jual beli ini fasid.

Kemudian apabila jual beli ditinjau dari segi bentuknya, maka jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli (*ba'i*) yang menjadi:
 - 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya.
 - 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter).
 - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.⁵²

⁴⁹*Ibid.*,

⁵⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 126.

⁵¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 83.

⁵²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 108.

b. Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
- 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati, ini dinamakan *salam*.
- 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).⁵³

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:

- 1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- 2) *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual tersebut. Jual beli ini dibagi menjadi tiga bagian antara lain:
 - a) *Ba'i Murabahah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - b) *Ba'i Al-Wadhiyyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.⁵⁴

⁵³*Ibid.*, h. 109.

B. Tentang *Al-Ijarah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Ijarah*

Secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah *al-ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁵⁵

Dan secara epistemologi *al-ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *al-ijarah*. Kata *al-ajr* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.⁵⁶ Selain itu *al-ijarah* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu’ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta’jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta’jir* oleh seorang *mu’ajjir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.⁵⁷

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

⁵⁶ A Riawan Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari’ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), h. 145

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.228

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *al-ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* juga dapat diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*.

Mengenai legalitas *al-ijarah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa *al-ijarah* diisyaratkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Berikut uraiannya:

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an Allah S.W.T berfirman di dalam surat Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.”⁵⁸

Selain itu Allah S.W.T juga berfirman dalam surat al-Baqarah

ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamah* (Semarang: CV As-Syifa, 2001), h. 140.

لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang pantas kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁶⁰

Dalam ayat lain pula Allah S.W.T mengisyaratkan legalitas upah (ongkos/fee) dalam surat al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

⁵⁹ *Ibid.*, h.46

⁶⁰ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَبَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁶¹

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seseorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.⁶²

b. Hadis

Hadis merupakan perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Selain itu ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadis yang menegaskan tentang *al-ijarah*, hadis Rasulullah SAW menegaskan:

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h.740

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Cet 2, 2009), h. 610.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).⁶³

Artinya: Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah S.A.W: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).⁶⁴

Diisyaratkan pula agar upah dalam transaksi *al-ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah (ongkos/fee). Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah S.A.W bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ).⁶⁵

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw bersabda: barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya” (H.R. Abdul Razaq).⁶⁶

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَ أَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁶⁷

Artinya: Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan. (H.R. Bukhari).⁶⁸

Selain itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang ancaman yang diberikan bagi orang yang melanggar dan tidak memenuhi hak-hak orang

⁶³ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443..., h. 816.

⁶⁴ Imam al-Munziri, *Ringkasan Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Ahcmad Zaidun..., h. 571.

⁶⁵ Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam al-Shan'ani, *Mushannaf Abdul Razzaq*, Juz. VIII, No. 15024 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012), h. 235.

⁶⁶ Al-Imam Abdul Razzaq, *Mushannaf Abdul Razzaq*, diterjemahkan oleh Sulaiman Mahmud (Jakarta: Pustaka Islam, 2010), h. 192.

⁶⁷ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h.125.

⁶⁸ Imam al-Munziri, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Ahcmad Zaidun..., h. 548.

lain di dalam hadis Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁶⁹

Artinya: Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: Allah *swt* berkata: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari).⁷⁰

c. Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁷¹

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* masa pertama”. *al-ijarah* merupakan akad

⁶⁹ *Ibid*, Juz. III, No. 2270..., h. 90.

⁷⁰ Imam al-Munziri, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Ahcmad Zaidun..., h. 549.

⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: 2010), h.145-146.

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷²

2. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁷³

Menurut Jumhur Ulama, rukun *al-ijarah* ada 4, yaitu:

a. *Al-'Aqidan*

Yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁷⁴

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad, terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁷⁵

c. Upah

⁷² Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.117.

⁷³ Muhammad Al-Albani, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 117.

⁷⁵ Moh Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya, TerbitTerang, 2005), h.178.

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'jir*.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁷⁶

Mengenai syarat *al-ijarah* terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

3. Bentuk-Bentuk *Al-Ijarah*

Melihat dari beberapa pengertian *al-jarah* yang telah diuraikan diatas telah disebutkan bahwa *al-ijarah* itu merupakan sebuah transaksi atas

⁷⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

suatu manfaat, manfaat objek transaksi.⁷⁷ Dilihat dari segi objeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fikih kepada dua macam:

a. *Al-ijarah* yang Bersifat Manfaat

Umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.⁷⁸

Al-ijarah yang bersifat manfaat ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan cara memeriksa atau pemilik menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *al-ijarah* dapat diserahkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *Ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat karaoke untuk maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain.
- 4) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda.
Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan rumah

⁷⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing), h. 81

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., h. 236.

untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi untuk diambil susunya, menyewakan tumbuhan untuk diambil buahnya, dan lain-lain.

- 5) Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi zat dan pengurangan sifatnya.⁷⁹

b. *Al-Ijarah* yang Bersifat Pekerjaan

Ialah dengan cara memperkerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fikih, hukumnya boleh apabila apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁸⁰

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya, misal menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Intinya dalam hal *al-ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek *al-ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain.

Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *ijarah mu'adzin*, imam dan

⁷⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183.

⁸⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 236.

pengajar Al-Qur'an, menurut fuqaha Hanifiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan *al-ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh, karena berlaku kepada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.⁸¹

4. Batalnya dan Berakhirnya *Al-Ijarah*

Sebelum membahas lebih dalam mengenai batal dan berakhirnya *al-ijarah* ulama fikih berpendapat, maka ada baiknya membahas tentang objek *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat atau tidak?

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat '*udzur*' seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

⁸¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), *Ibid*, h. 185.

Menurut mayoritas ulama, akad *al-ijarah* itu tidak menjadi batal, dikarenakan menurut mereka suatu manfaat dapat diwariskan kepada ahli waris. Karena suatu manfaat juga termasuk harta.

Adapun yang menjadi sebab batalnya upah adalah sebagai berikut:

- a. Jika benda ada di tangan *Ajir*
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, *Ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *Ajir* berhak mendapat upah pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- 2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan benda, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila itu berupa jasa, maka orang yang bekerja tersebut berhak menerima upahnya.
- 3) Menurut madzhab Hanafiyah apabila wafatnya salah seorang yang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama wafatnya salah seorang berakad tidak mengakhiri akad dan bias diwariskan.

- 4) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 5) Mendapat manfaat. Jika Ijarah dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada belum selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

Al-ijarah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahnyanya kehidupan sehari-hari, apabila *al-ijarah* ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, *al-ijarah* dibolehkan dengan keterangan syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁸²

C. Sistem Pembayaran *GoBiz* Sebagai Bentuk Muamalah

Muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fikih sangat bervariasi bergantung pada sudut pandang mereka mengonsepsikan dalam pengertian luas atau dalam pengertian sempit.

Dalam pengertian secara luas, muamalah ialah aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Atau sebagai peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Pengertian secara luas ini sangat relevan dengan istilah yang berbunyi:

⁸² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13...., h. 199.

الدِّينُ هُوَ الْمُعَامَلَةُ.⁸³

Artinya: Agama merupakan muamalah.

Sedangkan dalam pengertian yang sempit, sebagaimana menurut Hudlari Bik, muamalah adalah:

الْمُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ.⁸⁴

Artinya: Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa setiap transaksi yang bertujuan tukar-menukar atas suatu manfaat baik manfaat tersebut bersumber dari suatu jasa dan barang, maka transaksi tersebut disebut muamalah. Di samping itu pengertian di atas terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah yang ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda.

Berdasarkan pengertian arti sempit itu pula para pakar fikih membagi muamalah kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Muamalah Al-Maddiyah* adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat *al-Muamalah al-Maddiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaratan bagi manusia dan lain-lain.

⁸³ Munqadz bin Mahmud al-Siqar, *Al-Din al-Mu'amalah* (Madinah: Rabithah al-'Alam al-Islami, 2009), h. 28

⁸⁴ Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Minhaj al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh...*, h. 208.

2. *Al-Muamalah Al-Adabiyyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda, yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam dan lain-lain. Atau lingkup muamalah *al-Muamalah al-Adabiyyah* adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan dan lainnya.

GoBiz merupakan salah satu sistem pembayaran non tunai pada sebuah aplikasi *mobile* khusus untuk para partner *go-food* untuk membantu mengelola restoran pada layanan *go-food* dengan lebih mudah, cepat dan praktis. Selain itu *GoBiz* merupakan sarana untuk mempermudah bagi pemilik restoran atau untuk mempromosikan dan menjual makanannya pada *go-food* serta untuk mengembangkan, mengontrol dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan usaha. Dengan menggunakan *GoBiz* para pemilik restoran dapat mengaktifkan/menonaktifkan menu makanan, mengubah jam buka restoran, menerima pembayaran dengan *go-pay* dan lain-lain.

Kaitannya dengan kegiatan muamalah, transaksi jual beli dengan pembayaran melalui sistem *GoBiz* dapat ditinjau dari kedua pembagian muamalah di atas yaitu *al-Mu'amalah al-Maddiyah* dan *al-Mua'malah al-Adabiyyah*. Dari sisi *al-Mu'amalah al-Maddiyah* transaksi jual beli dengan pembayaran melalui sistem aplikasi *GoBiz* ialah apakah transaksi ini diperbolehkan dalam hukum Islam atau tidak. Dan dari sisi *al-Mua'malah al-Adabiyyah* ialah mengenai sistem ijab dan kabul dalam transaksi ini, dikarenakan ijab kabul dalam transaksi ini menggunakan kemajuan teknologi.

D. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Anggun Dianitamy dalam skripsinya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-Food* (Studi Kasus Pada Restoran *Go-Food* Sukarame Bandar Lampung).
2. Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dan Gusti Khairina Shofia dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi *Go-Food* (Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, Volume II, No. 1, Januari 2018).

Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah dalam penelitian ini adalah penulis tidak hanya meneliti tentang bagaimana akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut, akan tetapi penulis meneliti dari segi kacamata hukum Islam tentang keterlambatan pembayaran ke pihak restoran yang dalam hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dan selain itu pula hal ini dapat merugikan pihak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalani, Abi al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Bulugh al-Maram*. Dar al-‘Ilmi: Surabaya, tt.
- Al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Fauzan. Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Al-Hishni, Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu’min. *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*. Beirut: Dar al-Minhaj. 2008.
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. Kairo: Dar al-Hadits. 2004.
- Al-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Mesir: Mathba’ah al-Mishr, 1930.
- Al-Nassa’i, Ahmad Bin Syu’aib Bin ‘Ali. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Sajistani, Sulaiman bin al-Asyats. *Sunan Abi Daud*. Damaskus: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin ‘Isa. *Al-Jami’ al-Kabir*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj al-Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyasaar*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2008.
- Anwar. Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Suara Agung, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Hidayat. Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Ibn Hanbal, Ahmad Bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ibn Majah, Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub. 1997.
- Khumedi Ja'far, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Tt: Permatanet Publishing, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokus Media, 2008.
- Malik. *Al-Muwattha'*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Meolong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2001.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Syafe'i. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Syarifuddin. Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Sumber Jurnal

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015).

Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Juni 2015).

